

Demokrasi *Bottom-up* dalam Penganggaran di Porto Alegre: Peran Kelompok Masyarakat dalam Tata Kelola Anggaran Daerah

Averina Shalva¹, Fayza Arzmy Niafaran², Nabila Fitria Ariyanti³, Ridwan⁴, Gema Pertiwi⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 2410413141@mahasiswa.upnvj.ac.id¹,

2410413122@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2410413040@mahasiswa.upnvj.ac.id³,

ridwan.fisip@upnvj.ac.id⁴, gemapertiwi@upnvj.ac.id⁵,

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 23 Juli 2026

ABSTRACT

This study examines the mechanism of participatory budgeting (PB) in Porto Alegre, Brazil, as a bottom-up democracy model in regional budget governance. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on library research and guided by the Empowered Participatory Governance (EPG) framework, this study addresses three main questions: (1) how PB operates in Porto Alegre, (2) the role of community groups in the process, and (3) the factors that support and hinder its implementation. The findings indicate that Porto Alegre's PB operates through an annual deliberation cycle across 16 budget districts, granting citizens, especially the urban poor, real authority to determine public spending priorities through a devolved, multi-tiered forum structure. Civil society groups, including neighborhood associations, labor organizations, women's groups, and urban movements, serve as key driving actors that mobilize participation, channel aspirations, monitor implementation, and uphold the integrity of the deliberative process. Key supporting factors include the political commitment of the Partido dos Trabalhadores, strong civil society organizational capacity, inclusive institutional design, and growing public trust. Meanwhile, dependence on political leadership, unequal capacity among groups, fiscal constraints, and the potential for de-democratization became obstacles that weakened PB's sustainability after 2004. These findings have significant implications for strengthening citizen participation mechanisms in the context of Musrenbang in Indonesia.

Keywords: *participatory budgeting, bottom-up democracy, Porto Alegre, empowered participatory governance, civil society*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mekanisme penganggaran partisipatif (participatory budgeting/PB) di Porto Alegre, Brasil, sebagai model demokrasi bottom-up dalam tata kelola anggaran daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan yang dipandu kerangka Empowered Participatory Governance (EPG), penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana mekanisme PB bekerja di Porto Alegre, (2) bagaimana peran kelompok masyarakat dalam proses tersebut, dan (3) faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PB Porto Alegre bekerja melalui siklus deliberasi tahunan berbasis 16 wilayah anggaran, di mana warga, terutama kelompok miskin perkotaan, diberikan kewenangan riil untuk menentukan prioritas belanja publik melalui struktur forum

berjenjang yang mendevolusikan kekuasaan pengambilan keputusan. Kelompok masyarakat sipil, meliputi asosiasi lingkungan, organisasi buruh, kelompok perempuan, dan gerakan urban, menjadi aktor penggerak utama yang memobilisasi partisipasi, menyalurkan aspirasi, mengawasi implementasi, dan menjaga integritas proses deliberasi. Faktor pendukung utama mencakup komitmen politik Partido dos Trabalhadores, kapasitas organisasi masyarakat sipil yang kuat, desain kelembagaan yang inklusif, dan meningkatnya kepercayaan publik. Sementara itu, ketergantungan pada kepemimpinan politik, ketimpangan kapasitas antar kelompok, keterbatasan fiskal, serta potensi de-demokratisasi menjadi hambatan yang melemahkan keberlanjutan PB pasca 2004. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi upaya penguatan mekanisme partisipasi warga dalam konteks Musrenbang di Indonesia.

Kata Kunci: penganggaran partisipatif, demokrasi bottom-up, Porto Alegre, empowered participatory governance, masyarakat sipil

PENDAHULUAN

Demokrasi lokal tidak hanya terletak pada penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat daerah, tetapi juga pada sejauh mana warga negara dapat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Salah satu instrumen paling inovatif yang pernah dikembangkan dalam rangka memperdalam partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah penganggaran partisipatif atau *participatory budgeting*. *Participatory budgeting* merupakan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kota untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran publik. *Participatory budgeting* dimulai pada tahun 1989 oleh Kota Porto Alegre di Brasil Selatan. *Participatory budgeting* di Porto Alegre dipelopori oleh Partai Buruh yang condong ke kiri dan pro-kemiskinan (Naben, 2023).

Porto Alegre pada masa itu adalah ibu kota negara bagian Rio Grande do Sul yang sedang menghadapi persoalan ketimpangan sosial-ekonomi serius pada akhir 1980-an. Distribusi anggaran kota yang tidak merata, minimnya keterlibatan masyarakat miskin dalam proses kebijakan publik, serta tingginya tingkat korupsi birokrasi mendorong pemerintah kota untuk mencari model alternatif dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui penganggaran partisipatif, warga Porto Alegre diberikan ruang formal untuk menentukan prioritas belanja publik mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan rakyat. Mekanisme ini tidak hanya mengubah cara anggaran dialokasikan, tetapi juga mentransformasi relasi kuasa antara pemerintah dan masyarakat (Affandi et al., 2023). Secara ideal, tata kelola anggaran daerah yang demokratis mensyaratkan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut juga didukung oleh temuan Santoso et al. (2024) yang menyebutkan bahwa keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah karena partisipasi tersebut mendorong tumbuhnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap keputusan yang dihasilkan. Namun, dalam kenyataannya, proses penganggaran di banyak daerah, termasuk di Indonesia

masih bersifat *top-down*, tertutup, dan didominasi oleh elite birokrasi maupun elite politik.

Pengalaman Porto Alegre menawarkan suatu model alternatif yang membuktikan bahwa pendekatan *bottom-up* dalam penganggaran bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga mampu menghasilkan *outcome* yang lebih adil dan efektif. Peran kelompok masyarakat menjadi variabel sentral dalam keberhasilan penganggaran partisipatif di Porto Alegre. Kelompok-kelompok warga, asosiasi lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan forum-forum deliberatif bertindak sebagai aktor utama yang menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Affandi *et al.* (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan model penganggaran partisipatif di Porto Alegre sangat ditopang oleh kekuatan mobilisasi politik Partai Buruh sebagai kekuatan ideologis yang mendorong implementasi mekanisme tersebut, serta oleh kapasitas kelembagaan forum-forum warga yang dibentuk di 16 wilayah kota. Penelitian Silvia dan Lutfi (2022) juga mengonfirmasi bahwa penganggaran partisipatif terbukti meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penguatan kepercayaan warga kepada pemerintah lokal, sebagaimana yang terjadi di Porto Alegre di mana pajak daerah dapat dinaikkan karena legitimasi pemerintah meningkat.

Touchton, McNulty, dan Wampler (2023) dalam *Participatory Budgeting and Community Development: A Global Perspective* mengkomparasi dampak penganggaran partisipatif terhadap perkembangan komunitas di berbagai negara. Temuan menekankan bahwa keberhasilan *participatory budgeting* dalam menghasilkan perubahan sosial yang berarti sangat bergantung pada sejauh mana organisasi dan masyarakat sipil (*civil society*) dilibatkan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan dan hasilnya akan cenderung lemah ketika organisasi masyarakat sipil tersisihkan dari proses penganggaran. Selanjutnya, Schugurensky dan Mook (2024) dalam *Participatory Budgeting and Local Development* mengkaji dampak, tantangan, dan prospek dari *participatory budgeting* (PB). Mereka menemukan bahwa penganggaran partisipatif seperti model Porto Alegre berpotensi besar mendorong keterlibatan dan kepedulian warga negara, demokrasi yang lebih sehat, serta kualitas hidup yang lebih baik. Namun, keberlangsungannya sangat bergantung pada kemauan politik dan sumber daya yang dimiliki tiap pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan pentingnya konteks politik lokal tempat *participatory budgeting* dijalankan.

Bouras (2024) melalui artikelnya *The Role of Porto Alegre Participatory Budget Model in Local Development* juga menunjukkan bahwa mekanisme *participatory budgeting* ini merupakan inovasi penting dalam mendemokratisasi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Studi tersebut menekankan bahwa pelibatan langsung warga dalam alokasi anggaran meningkatkan transparansi, akuntabilitas, inklusi sosial serta distribusi sumber daya yang lebih adil. Konsep ini juga memperkuat keterlibatan sipil, membangun modal sosial, dan memperkuat institusi demokrasi lokal. Namun demikian, penelitian ini menggarisbawahi adanya tantangan dalam implementasi, serta menunjukkan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada mekanisme yang digunakan dan konteks lokal yang melingkupinya.

Carmo, Pereira, Rezende, dan Felizardo (2024) dalam *Participatory Budgeting and The Formation of Public Spheres* yang meneliti hubungan antara *participatory budgeting* dan pembentukan ruang publik deliberatif dengan kerangka teori tindakan komunikatif Habermas. Mereka mengidentifikasi bahwa PB mampu membentuk ruang publik yang memungkinkan partisipasi kelompok yang selama ini tersisih, meningkatkan kesadaran warga, dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong transparansi pemerintahan. Affandi, Marijan, dan Windyastuti (2023) dalam *Participatory Budgeting in Indonesia: From the Policy Innovation to the Democracy Innovation* melakukan perbandingan praktik penganggaran partisipatif di Indonesia dari era awal reformasi hingga era reformasi lanjutan. Mereka menemukan bahwa model Musrenbang yang disponsori World Bank bersifat inovasi kebijakan teknokratis dimana komunitas dijadikan objek kebijakan bukan subjek yang menentukan arah pembangunan, sementara program Produmas di Kota Kediri yang menempatkan RT sebagai fokus partisipasi dinilai jauh lebih progresif karena mampu membuka ruang deliberasi yang lebih nyata.

Namun demikian, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang seragam. Wampler dan Touchton (2022) dalam *Governance in Translation: Participatory Budgeting Across The Developing World* yang fokus pada pengaruh transparansi dan partisipasi dalam *participatory budgeting* terhadap akuntabilitas menunjukkan bahwa dalam praktik implementasi lokal, *participatory budgeting* yang pertama menyebar dari Porto Alegre, Brazil justru membuat hubungan pemerintah daerah lebih kuat terbentuk dengan pemerintah pusat dibandingkan warganya sendiri. Selain itu, perubahan yang berarti (*meaningful change*) sulit tercapai di daerah dengan kapasitas kelembagaan rendah, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus berpotensi membatasi akuntabilitas sosial.

Penelitian oleh Fedozzi dan Müller (2025) mengkaji perkembangan *participatory budgeting* di Porto Alegre dengan melihat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai konteks politik dan perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penganggaran partisipatif telah berlangsung lama, kualitas dan daya pengaruhnya mengalami penurunan akibat perubahan kondisi politik dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan *participatory budgeting* sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan ekonomi yang melingkupinya, sehingga tidak selalu berjalan stabil sebagai praktik demokrasi partisipatif. Penelitian lain oleh Lefebvre (2025) dalam *Changing Urban Movements Repertoires Following the Erosion of Porto Alegre's Participatory Budgeting* mengkaji bagaimana gerakan warga Porto Alegre beradaptasi ketika mekanisme *participatory budgeting* secara bertahap melemah. Melalui studi kasus gerakan komunitas di Lomba do Pinheiro, ia menemukan bahwa Porto Alegre mengalami de-demokratisasi dan kembali ke praktik patronase lama berbasis dukungan elektoral yang mengakibatkan *participatory budgeting* terus mengalami erosi.

Dari literatur di atas, dapat diidentifikasi bahwa kajian tentang *participatory budgeting* secara global lebih banyak berfokus pada desain institusional, dampak kebijakan, dan komparasi antar negara. Penelitian yang secara spesifik menganalisis mekanisme kerja penganggaran partisipatif di Porto Alegre sebagai sistem

demokrasi *bottom-up* dengan fokus pada peran kelompok masyarakat sebagai aktor politik aktif masih sangat terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada mekanisme kerja *participatory budgeting* di Porto Alegre sebagai model demokrasi *bottom-up*, sekaligus menempatkan kelompok masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola anggaran daerah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana proses tersebut berlangsung, tetapi juga mengidentifikasi secara kritis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman akademik yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta menjadi rujukan komparatif yang relevan bagi pengembangan praktik partisipasi masyarakat dalam tata kelola penganggaran daerah, khususnya dalam konteks Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Empowered Participatory Governance (EPG) dari Fung dan Wright (2003) sebagai kerangka analisis utama karena dikembangkan dari pengamatan terhadap berbagai inovasi partisipatif, termasuk PB di Porto Alegre. EPG menekankan tiga dimensi utama, yaitu devolusi kekuasaan, koordinasi terpusat dengan partisipasi dari bawah, dan eksperimentalisme deliberatif, yang digunakan untuk menganalisis mekanisme, aktor, dan faktor keberhasilan PB Porto Alegre. Sebagai pelengkap, penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif Habermas untuk menjelaskan pentingnya kualitas proses musyawarah dalam membangun legitimasi keputusan publik, khususnya dalam menganalisis peran kelompok masyarakat dalam menjaga integritas deliberasi. Selain itu, Arnstein's Ladder of Citizen Participation digunakan secara terbatas pada bagian implikasi komparatif untuk menilai tingkat devolusi kekuasaan PB Porto Alegre dibandingkan Musrenbang di Indonesia. Ketiga dimensi EPG selanjutnya menjadi kategori analisis dalam bagian metode, hasil, dan pembahasan.

Penelitian ini penting dilakukan karena pengalaman Porto Alegre menawarkan pelajaran berharga bagi konteks demokrasi lokal di berbagai negara, termasuk Indonesia yang tengah mengembangkan sistem otonomi daerah dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai instrumen partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mekanisme *participatory budgeting* di Porto Alegre, peran kelompok masyarakat dalam pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasinya dalam kerangka EPG dan demokrasi deliberatif. Untuk itu, penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana mekanisme *participatory budgeting* di Porto Alegre sebagai model demokrasi *bottom-up*; (2) bagaimana peran kelompok masyarakat dalam proses *participatory budgeting*; dan (3) faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi *participatory budgeting* dalam tata kelola anggaran daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam mekanisme *participatory budgeting* (PB) di Porto Alegre dan peran kelompok masyarakat di dalamnya.

Analisis tematik menggunakan tiga dimensi kerangka Empowered Participatory Governance (EPG), yaitu devolusi kekuasaan, koordinasi terpusat-berbasis-bawah, dan eksperimentalisme deliberatif, sehingga penurunan tema dilakukan secara deduktif dengan tetap terbuka terhadap temuan induktif dari data. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Objek kajian adalah Kota Porto Alegre sebagai fokus studi kasus dengan data bersumber dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku dan literatur akademik, laporan penelitian, dokumen resmi terkait PB di Porto Alegre, serta artikel ilmiah tentang peran kelompok masyarakat dalam demokrasi partisipatif yang tersedia secara daring. Penelusuran sumber dilakukan melalui basis data Google Scholar, Scopus dengan rentang tahun terbit 2001–2025, menggunakan kombinasi kata kunci "*participatory budgeting Porto Alegre*", "*empowered participatory governance*", "*bottom-up democracy*", dan "*civil society budgeting*". Kriteria inklusi meliputi sumber berbahasa Inggris atau Indonesia yang membahas langsung mekanisme, aktor, atau faktor keberhasilan atau hambatan PB Porto Alegre. Berdasarkan prosedur tersebut, penelitian ini menggunakan 24 sumber primer berupa artikel jurnal dan bab buku yang secara langsung membahas kasus Porto Alegre, serta beberapa sumber sekunder berupa buku metodologi dan literatur pembandingan mengenai Musrenbang di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur (*literature review*). Peneliti membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, serta menelusuri sumber daring yang kredibel untuk melengkapi data yang diperlukan. Studi kasus dalam penelitian ini dibatasi pada periode 1989–2004 sebagai fase konsolidasi dan puncak keberhasilan PB Porto Alegre, serta periode pasca-2004 sebagai fase pelemahan dan de-demokratisasi mekanisme tersebut. Keterbatasan data berupa ketergantungan pada interpretasi penulis sumber primer serta keterbatasan dalam memverifikasi temuan melalui observasi atau wawancara langsung di lapangan. Keterbatasan ini diantisipasi dengan melakukan triangulasi antar-sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai penulis yang mengkaji periode dan aspek yang sama dari kasus Porto Alegre, guna meningkatkan kredibilitas interpretasi yang dihasilkan. Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): (1) reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah; (2) penyajian data (*data display*), mengorganisasikan data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dianalisis; dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang diperoleh dari data yang telah dianalisis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama mengenai peran kelompok masyarakat serta faktor keberhasilan PB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penganggaran Partisipatif di Porto Alegre sebagai Model Demokrasi Bottom-up

Penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) di Porto Alegre mulai dilakukan pada tahun 1989 untuk mengatasi pengucilan politik, ekonomi, dan

sosial yang muncul akibat kesulitan kota dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas ketika arus masuk imigran meningkat melalui mekanisme pendekatan partisipatif yang sejalan dengan nilai sosialis demokratis. Pendekatan ini digunakan karena mampu menciptakan peluang untuk menggabungkan proses keuangan, tata kelola, dan perencanaan dengan peningkatan akses layanan perkotaan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu (Abers *et al.*, 2018). Demokrasi *bottom-up* terlihat dalam upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dari bawah ke atas melalui kesempatan untuk memberikan masukan kreatif selama proses pengambilan keputusan alokasi anggaran berlangsung. Porto Alegre memberikan warganya pengalaman penganggaran yang partisipatif dan *bottom-up* dengan memastikan representasi berdasarkan geografi dan tema masalah terserap secara maksimal dan digunakan dalam penentuan prioritas investasi publik di lingkungan tempat tinggal mereka agar kualitas hidup meningkat dan kebijakan anggaran disesuaikan dengan masalah area kota masing-masing. Melalui mekanisme *participatory budgeting* ini, kebijakan anggaran yang dihasilkan Porto Alegre dapat dikatakan terjadi secara *bottom-up* sebab melibatkan kaum miskin (*the poor*), menghapus relasi klientelisme, mendistribusikan kembali infrastruktur dan layanan perkotaan kepada masyarakat, serta mendorong demokrasi radikal dengan mendemokratisasi kekuatan masyarakat sipil.

Mekanisme penganggaran partisipatif di Porto Alegre berhasil mengatasi masalah infrastruktur skala kecil di tingkat lingkungan. Namun, PB kurang efektif jika diterapkan untuk proyek anggaran berskala besar sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih besar memerlukan perubahan yang lebih besar juga. Menurut Abers *et al.* (2018), sistem pemerintahan yang partisipatoris dalam urusan anggaran memang menjadi lebih inklusif terutama bagi kaum miskin yang diberikan ruang bersuara, tapi secara keseluruhan sistem politik tetap tidak berubah. Minimnya transformasi menyeluruh ini membuat kapasitas *participatory budgeting* terbatas dan tidak mampu mengatasi masalah anggaran yang makro. Keterbatasan ini sejalan dengan kritik Fung dan Wright (2003) terhadap model Empowered Participatory Governance (EPG) yakni bahwa devolusi kekuasaan dalam EPG paling efektif diterapkan pada tingkat lokal yang memungkinkan warga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam proyek berskala besar, kebutuhan koordinasi lintas sektor dan kompleksitas teknokratis membuat keputusan tetap memerlukan otoritas pemerintah yang lebih terpusat. Dengan demikian, EPG mampu mendorong demokratisasi pengambilan keputusan hanya pada level lokal dan belum secara otomatis mengubah struktur kekuasaan dan tata kelola kota secara menyeluruh.

Dalam Abers *et al.* (2018) dijelaskan bahwa *participatory budgeting* yang dilakukan di Porto Alegre dilaksanakan atas siklus tahunan dengan membagi kota ke dalam 16 wilayah anggaran. Seluruh wilayah kemudian akan masing-masing menyelenggarakan serangkaian forum terbuka bagi seluruh warganya untuk menyerap aspirasi secara *bottom-up*. Pada tingkat lingkungan, warga bersama komunitas akan mengidentifikasi kebutuhan dan juga mengusulkan proyek investasi. Hasil usulan lalu dibawa ke forum regional, dimana warga memilih delegasi secara proporsional untuk mewakili di Forum Delegasi Regional yang

bertugas menetapkan prioritas proyek. Dari forum regional ini akan dipilih dua perwakilan untuk mewakili warga di Dewan Anggaran Kota (*Municipal Budget Council*) yaitu badan deliberatif yang seluruh kursinya diisi representasi masyarakat sipil. Dewan Anggaran Kota yang kemudian menyetujui distribusi dana antarwilayah dan mengawasi keseluruhan proses hingga menghasilkan Investment Plan (Rencana Investasi) yang mengikat komitmen pemerintah secara publik.

Proses penganggaran partisipatif ini menunjukkan mekanisme model bottom-up dengan karakteristik forum yang terbuka sehingga masyarakat termasuk kaum marjinal seperti *the poor* aktif terlibat tidak hanya sekedar mengawasi saja tetapi punya ruang suara untuk menyampaikan masalah kepada pihak yang secara birokrasi 'di atas' yakni pemerintah. Selain itu, keputusan akhir alokasi anggaran juga secara ketat diproses berdasarkan daftar prioritas yang telah ditetapkan oleh warga selama proses penyaringan aspirasi, hal ini mendorong perubahan *bottom-up* dimana input dan output kebijakan anggaran dibuat atas identifikasi dari masyarakat kota dan bukan diskresi pejabat. Apabila Dewan Anggaran Kota mempertanyakan atau menolak usulan pemerintah, pemerintah wajib menghormati otoritas dewan tersebut yang membuktikan kekuatan demokrasi sipil dalam mengatur arah regulasi anggaran kota mereka sendiri. Proses ini dikembangkan pada 1994 dengan penambahan forum tematik yang membahas isu-isu skala kota seperti transportasi dan pendidikan yang memperluas ruang partisipasi menjadi lebih terarah dan suara masyarakat kota marjinal bisa didengar melalui diskusi terkait isu kota yang spesifik. Adanya keterlibatan aktif masyarakat kota dalam mekanisme penganggaran partisipatif di Porto Alegre, Brazil menurut Amin (2020) membuat masyarakat memiliki kesempatan dalam menetapkan pengalokasian sumber daya yang ada, membuat prioritas kebijakan sosial, dan juga belanja anggaran publik dapat dipantau langsung.

Temuan adanya struktur forum berjenjang dalam studi kasus Porto Alegre merupakan bentuk demokrasi *bottom-up* didukung oleh kerangka Empowered Participatory Governance (Fung & Wright, 2003) dengan adanya devolusi kekuasaan yang diberikan kepada masyarakat melalui forum lingkungan dan regional. Hal ini dilakukan dengan cara menyerap aspirasi sekaligus kewenangan menentukan prioritas proyek. Selain itu, koordinasi dari pusat dan masyarakat terlihat pada peran Dewan Anggaran Kota mengawasi dan mengoordinasikan hasil seluruh forum regional agar konsisten menjadi Investment Plan kota. Kewajiban pemerintah untuk menghormati keputusan Dewan Anggaran Kota juga menegaskan bahwa devolusi kekuasaan dalam kasus ini bersifat mengikat (*binding*) yang berimplikasi pada ciri pemerintahan dengan tingkat partisipatif berdaya (*empowered*) dibandingkan sekedar partisipasi tokenistik.

Peran Kelompok Masyarakat dalam Proses Penganggaran Partisipatif di Porto Alegre dan Kontribusinya terhadap Keberhasilan Penganggaran Partisipatif

Pengalaman Porto Alegre memperlihatkan bahwa masyarakat sipil memiliki posisi yang jauh lebih penting dibanding sekedar objek konsultasi pemerintah. Mereka terlibat aktif sebagai kekuatan politik yang menentukan arah kebijakan anggaran kota yang dimulai dari proses penyusunan hingga implementasinya. Bentuk keterlibatan tersebut mencakup mobilisasi partisipasi warga, penyampaian

aspirasi komunitas, proses tawar-menawar antar kelompok dalam forum deliberatif, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, hingga pemberian tekanan politik kepada pemerintah apabila komitmen anggaran tidak dijalankan. Touchton *et al.* (2023) melihat kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *participatory budgeting* dalam menghasilkan dampak sosial sangat dipengaruhi oleh keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan. Jika partisipasi masyarakat tersebut terbatas atau bahkan diabaikan, maka hasil *participatory budgeting* biasanya hanya bersifat formalitas tanpa dampak yang signifikan.

Partisipasi dalam penganggaran partisipatif di Porto Alegre didukung oleh keterlibatan banyak kelompok masyarakat sipil dengan latar belakang yang beragam. Kelompok tersebut mencakup asosiasi lingkungan, organisasi buruh, kelompok perempuan, gerakan masyarakat miskin perkotaan, organisasi keagamaan berbasis komunitas, hingga kelompok advokasi di bidang perumahan dan lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil di Porto Alegre telah memiliki jaringan yang luas sejak masa transisi menuju demokrasi di Brasil pada era 1980-an. Dalam penelitiannya, Baiocchi (2001) menunjukkan bahwa organisasi lingkungan dan aktivis komunitas berfungsi sebagai penghubung antara warga dengan institusi *participatory budgeting*. Mereka tidak hanya mendorong partisipasi warga dalam forum, tetapi juga membantu masyarakat memahami agenda maupun prosedur teknis serta memastikan aspirasi kelompok miskin tetap terwakili dalam proses deliberatif.

Inklusivitas dalam *participatory budgeting* sangat dipengaruhi oleh kemampuan kelompok masyarakat dalam memobilisasi partisipasi warga. Tanpa adanya dorongan aktif dari asosiasi lingkungan dan komunitas lokal, forum *participatory budgeting* cenderung hanya diikuti oleh kelompok yang lebih mapan secara organisasi maupun pendidikan. Situasi seperti ini justru dapat mempertahankan ketidaksetaraan sosial yang sebelumnya sudah ada. Menurut Novy dan Leubolt (2005), keberhasilan Porto Alegre dalam melibatkan masyarakat miskin kota tidak terlepas dari kapasitas organisasi gerakan sosial urban yang telah dibangun selama bertahun-tahun sebelum pelaksanaan *participatory budgeting*. Organisasi tersebut bukan hanya menjadi sarana mobilisasi warga, tetapi juga memberikan pendampingan kepada peserta baru agar keterbatasan pendidikan dan pengalaman politik tidak mengurangi kualitas keterlibatan mereka dalam forum deliberatif (Novy dan Leubolt, 2005).

Kelompok masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga memiliki peran politik yang penting melalui proses penggabungan dan penentuan prioritas kepentingan warga. Sebelum forum distrik dimulai, tiap komunitas biasanya melakukan pembahasan internal untuk menentukan kebutuhan yang akan diperjuangkan. Proses tersebut menunjukkan bahwa deliberasi tidak hanya terjadi dalam forum resmi *participatory budgeting*, tetapi juga berlangsung di tingkat komunitas paling bawah. Wampler (2007) menjelaskan bahwa *participatory budgeting* mendorong terbentuknya aliansi antarwarga sehingga tercipta kemampuan bekerja sama dan meningkatnya rasa saling percaya antar komunitas dalam jangka panjang. Dengan demikian, *participatory budgeting* tidak

hanya menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih merata, tetapi juga membangun kapital sosial berupa jaringan kepercayaan dan budaya kerja sama yang memperkuat kohesi masyarakat sipil secara umum (Wampler, 2007).

Aspek lain yang penting adalah keterlibatan kelompok masyarakat dalam mengawasi implementasi anggaran dan menjaga akuntabilitas pemerintah. Delegasi warga yang dipilih melalui forum *participatory budgeting* memiliki tugas untuk memastikan bahwa program yang telah disepakati benar-benar dijalankan oleh pemerintah kota. Jika terjadi penyimpangan maupun keterlambatan pelaksanaan, kelompok masyarakat yang terorganisir dapat menuntut penjelasan secara langsung kepada pemerintah. Santoso *et al.* (2024) menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah karena mendorong munculnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil kebijakan. Hal tersebut terjadi karena partisipasi publik menumbuhkan rasa memiliki terhadap keputusan yang dibuat sehingga pengawasan masyarakat berlangsung secara terus-menerus dan alami (Santoso *et al.*, 2024).

Salah satu dampak paling nyata dari keterlibatan kelompok masyarakat dalam *participatory budgeting* di Porto Alegre terlihat pada perubahan distribusi anggaran yang menjadi lebih berpihak kepada masyarakat miskin perkotaan. Sebelum penerapan *participatory budgeting*, dana pembangunan lebih banyak difokuskan pada wilayah yang telah berkembang. Di sisi lain kawasan kumuh dan daerah pinggiran yang dihuni kelompok pekerja serta warga miskin kurang memperoleh perhatian pemerintah. Melalui mekanisme forum anggaran yang memberikan hak suara setara kepada seluruh warga, kelompok miskin kota memperoleh kekuatan kolektif untuk mendorong kebutuhan mereka menjadi prioritas utama pembangunan publik. Kebutuhan tersebut mencakup sanitasi, penerangan jalan, perbaikan jalan lingkungan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Penelitian Marquetti *et al.* (2012) juga memperlihatkan bahwa selama pemerintahan PT (Partido dos Trabalhadores), investasi publik secara konsisten lebih banyak diarahkan ke wilayah dengan tingkat pendapatan rendah, sehingga menghasilkan efek redistribusi yang nyata (Marquetti *et al.*, 2012).

Kontribusi kelompok masyarakat dalam *participatory budgeting* Porto Alegre tidak hanya terlihat pada partisipasi mereka, tetapi juga pada upaya menjaga integritas proses deliberasi. Dalam forum, kelompok yang lebih berpengalaman sering mengambil posisi sebagai pengawas norma deliberatif dengan mengingatkan peserta agar fokus pada kebutuhan objektif masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, mereka berusaha membangun solidaritas antar komunitas daripada menciptakan persaingan. Situasi ini menciptakan hubungan dialektis antara masyarakat sipil dan negara. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat tidak hanya berperan sebagai pihak yang memberi tekanan dari luar pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses internal untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif tetap diterapkan dalam mekanisme *participatory budgeting* (Novy dan Leubolt, 2005). Peran ini sejalan dengan pandangan Habermas bahwa legitimasi keputusan publik ditentukan oleh hasil akhir dan kualitas proses deliberasi yang menghasilkannya.

Keterlibatan kelompok masyarakat dalam *participatory budgeting* di Porto Alegre tidak hanya berdampak pada proses partisipasi, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah kota. Silvia dan Lutfi (2022) dalam *Participatory Budgeting: Lessons for Indonesia* yang menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi warga dalam *participatory budgeting* mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Kepercayaan tersebut kemudian memungkinkan pemerintah kota meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kenaikan pajak yang didukung legitimasi publik yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah bersedia melibatkan warga dalam proses penganggaran, hasil yang diperoleh justru berupa peningkatan dukungan masyarakat dan sumber daya fiskal. Warga yang merasa memiliki pengaruh dalam menentukan penggunaan dana pajak cenderung lebih patuh dalam membayar pajak, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung antara partisipasi, kepercayaan publik, dan kapasitas keuangan daerah (Silvia & Lutfi, 2022).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penganggaran Partisipatif sebagai Instrumen Demokrasi Lokal di Porto Alegre

Implementasi *participatory budgeting* di Porto Alegre Brazil sering dipandang sebagai salah satu inovasi demokrasi lokal yang paling berhasil di dunia karena mampu memperbanyak keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun demikian keberhasilan tersebut tidak terjadi secara otomatis dan instan. Praktik penganggaran partisipatif di Porto Alegre dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung dan juga menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek politik, sosial, kelembagaan hingga ekonomi yang saling berinteraksi dan berkaitan dalam membentuk efektivitas mekanisme demokrasi bottom-up yang baik tersebut.

Faktor utama yang menjadi pendukung keberhasilan implementasi *participatory budgeting* di Porto Alegre Brazil adalah adanya komitmen politik dari pemerintahan lokal khususnya pada masa pemerintahan Partido dos Trabalhadores atau Partai Buruh dari akhir 1980-an. Pemerintah kota pada masa itu tidak hanya membuka ruang partisipasi secara formal saja tetapi juga memberikan kewenangan dan hak nyata kepada masyarakat untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran publik. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi partisipatif sangat dipengaruhi oleh adanya *political will* dari para elite pemerintah dan politik untuk berbagi sebagian kekuasaan dan wewenang pengambilan keputusan kepada warganya. Keberlanjutan *participatory budgeting* sangat ditentukan oleh dukungan politik pemerintah daerah karena tanpa komitmen institusional yang kuat partisipasi masyarakat cenderung hanya bersifat simbolik tanpa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik (Badri, 2019).

Selain dukungan politik pemerintah seperti yang dituliskan di atas. Kapasitas organisasi masyarakat sipil yang kuat juga turut menjadi faktor pendukung yang penting dalam implementasi *participatory budgeting*. Porto Alegre memiliki tradisi yang dimana organisasi masyarakat sipil yang relatif berkembang terutama sejak masa transisi demokrasi Brasil pada 1980-an. Keberadaan asosiasi lingkungan, organisasi buruh, kelompok keagamaan berbasis komunitas serta

organisasi masyarakat miskin perkotaan mengambil andil besar dalam proses mobilisasi warga untuk terlibat aktif dalam forum penganggaran kota. Efektivitas *participatory budgeting* untuk menghasilkan perubahan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat sipilnya dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi tidak hanya sebagai alat mobilisasi partisipasi saja tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik warga agar mereka memahami proses deliberasi dan tata kelola anggaran pemerintahan (Touchton *et al*, 2024).

Faktor pendukung berikutnya berada pada desain kelembagaan penganggaran partisipatif yang relatif inklusif dan deliberatif. Mekanisme *participatory budgeting* di Porto Alegre Brazil dibangun melalui forum tingkat distrik dan tematik yang dapat memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan kalangan untuk menyampaikan kebutuhan dan saran mereka secara langsung. Dalam forum tersebut warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan mendiskusikan prioritas pembangunan dan memilih delegasi yang akan membawa aspirasi mereka ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Melibatkan langsung warga dalam alokasi anggaran publik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta inklusi sosial sehingga memperkuat legitimasi demokrasi lokal yang ada. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *participatory budgeting* tidak hanya bergantung hanya pada partisipasi warga saja tetapi juga pada keberadaan mekanisme institusional yang dapat mengakomodasi deliberasi secara terbuka dan setara (Goldsmith & Vainer, 2001).

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal turut menjadi faktor pendukung yang penting dalam mendukung implementasi *participatory budgeting*. Ketika masyarakat melihat dan mendapatkan bahwa usulan mereka benar-benar diakomodasi dalam kebijakan anggaran maka muncul rasa memiliki dan mengikat terhadap keputusan publik. Meningkatnya legitimasi pemerintah melalui keterlibatan masyarakatnya dalam proses penganggaran dapat memperkuat kepatuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah termasuk dalam halnya pembayaran pajak daerah. Dalam konteks Porto Alegre, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat menciptakan siklus positif berupa meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang kemudian dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah (Almasi & Mohammadi, 2024).

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung yang dijelaskan di atas implementasi *participatory budgeting* di Porto Alegre juga memiliki berbagai hambatan yang memengaruhi keberlanjutannya sebagai instrumen demokrasi lokal. Salah satu hambatannya adalah ketergantungan terhadap kondisi politik dan perubahan kepemimpinan pemerintahan daerah. Penganggaran partisipatif berkembang pesat ketika memperoleh dukungan kuat dari pemerintahan tetapi mengalami pelemahan ketika terjadi perubahan orientasi politik atau pergeseran kekuasaan pada pemerintah kota. Kualitas dan pengaruh *participatory budgeting* di Porto Alegre mengalami penurunan akibat adanya perubahan konteks politik serta menurunnya dukungan pemerintah terhadap mekanisme tersebut. Hal tersebut

menunjukkan bahwa demokrasi partisipatif yang terlalu bergantung pada siapa elite politik yang berkuasa dan rentan mengalami kemunduran ketika terjadi pergantian kekuasaan (Abers, 2018).

Hambatan selanjutnya ada pada ketimpangan kapasitas partisipasi antar kelompok masyarakat. Walaupun *participatory budgeting* dirancang sebagai mekanisme inklusif tidak semua kelompok masyarakat memiliki sumber daya organisasi, pengetahuan teknis ataupun pengalaman politik yang sama dan memadai untuk terlibat langsung secara efektif dalam proses *participatory budgeting*. Kelompok masyarakat yang lebih terorganisir cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mempengaruhi hasil deliberasi dibanding kelompok yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan maupun kapasitas mobilisasi. Tanpa adanya pendampingan organisasi masyarakat sipil para kelompok masyarakat miskin berisiko mengalami marginalisasi dalam forum deliberatif meskipun secara formal memiliki hak partisipasi yang sama untuk menyampaikan pendapatnya dan mengambil andil dalam forum tersebut (Rahayu et al, 2025).

Keterbatasan sumber daya fiskal pemerintah daerah pun juga menjadi hambatan dalam implementasi *participatory budgeting*. Tidak semua usulan warga dapat direalisasikan karena pemerintah kota juga tetap harus menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Ketika sumber daya fiskal mengalami tekanan pemerintah menghadapi tantangan dan kesulitan memenuhi ekspektasi warga yang telah berpartisipasi dalam forum penganggaran tersebut. Situasi tersebut dapat berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas *participatory budgeting* jika keputusan yang dihasilkan tidak diwujudkan secara nyata (Nisa & Budiono, 2025).

Hambatan lain yang dapat memengaruhi efektivitas *participatory budgeting* yaitu potensi de-demokratisasi dan kembalinya praktik patronase politik. Pelemahan mekanisme *participatory budgeting* di Porto Alegre mendorong munculnya kembali pola hubungan patron klien berbasis dukungan elektoral. Dalam kondisi ini proses dalam pengambilan keputusan kembali dipengaruhi oleh elit-elite politik dan kepentingan kelompok tertentu saja sehingga ruang deliberasi para warga mengalami penyempitan. Fenomena tersebut dapat menunjukkan bahwa keberlanjutan demokrasi partisipatif memerlukan penguatan institusi yang mampu menjaga independensi forum warganya dari dominasi kepentingan politik jangka pendek semata (Handayani & Imam, 2022).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa keberhasilan implementasi *participatory budgeting* di Porto Alegre Brazil tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan semata saja tetapi juga ditentukan oleh interaksi antara faktor politik, sosial, kelembagaan serta ekonomi. Dukungan pemerintah lokal, kekuatan masyarakat sipil, desain kelembagaan yang inklusif dan juga legitimasi publik ikut menjadi faktor-faktor utama yang penting dalam mendukung implementasi penganggaran partisipatif. Namun demikian tantangan berupa perubahan politik, ketimpangan kapasitas warga, keterbatasan fiskal dan juga potensi erosi demokrasi menjadi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas *participatory budgeting* sebagai instrumen demokrasi lokal. Temuan ini menunjukkan implikasi kemunduran *participatory budgeting* di Porto Alegre bersifat sistemik dan

melemahnya devolusi kekuasaan sebagai salah satu dimensi Empowered Participatory Governance (EPG) memicu pelemahan pada dimensi lainnya. Dengan itu, pengalaman Porto Alegre memperlihatkan bahwa demokrasi *bottom-up* membutuhkan dukungan institusional serta dukungan sosial yang berkelanjutan agar tetap mampu menjadi sarana partisipasi warga yang efektif dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Implikasi Komparatif bagi Musrenbang di Indonesia

Berdasarkan tiga dimensi Empowered Participatory Governance (EPG), pengalaman *participatory budgeting* (PB) di Porto Alegre memberikan pelajaran penting bagi penguatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Indonesia. Pada dimensi devolusi kekuasaan, PB Porto Alegre memberikan kewenangan yang lebih mengikat kepada warga melalui Dewan Anggaran Kota, sedangkan Musrenbang masih cenderung bersifat konsultatif karena hasil musyawarah tetap bergantung pada penetapan pemerintah (Affandi *et al.*, 2023). Pada dimensi koordinasi terpusat-berbasis-bawah, keduanya sama-sama memiliki mekanisme forum berjenjang, namun efektivitas Musrenbang sangat bergantung pada desain kelembagaan masing-masing daerah. Sementara itu, pada dimensi eksperimentalisme deliberatif, keberhasilan Porto Alegre didukung oleh kapasitas organisasi masyarakat sipil yang kuat dalam memobilisasi, mendampingi, dan mengawal partisipasi warga, kondisi yang belum sepenuhnya berkembang secara merata dalam praktik Musrenbang di Indonesia (Baiocchi, 2001; Novy & Leubolt, 2005).

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi *bottom-up* sebagaimana terlihat dalam studi kasus Porto Alegre tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum partisipatif saja melainkan juga oleh sejauh mana kewenangan warga bersifat nyata serta didukung kapasitas masyarakat sipil yang kuat. Dengan demikian, pengalaman Porto Alegre relevan bagi penguatan Musrenbang di Indonesia yang dapat dilakukan dengan peningkatan kekuatan hasil musyawarah warga terhadap konsistensi arah kebijakan, penguatan kelembagaan partisipatif, serta pemberdayaan organisasi masyarakat sipil agar proses perencanaan dan penganggaran daerah tidak berhenti pada partisipasi yang bersifat formal, melainkan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih inklusif, deliberatif, dan akuntabel.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan membahas hal mendasar dalam demokrasi lokal, yakni bagaimana mekanisme penganggaran partisipatif di Porto Alegre bekerja sebagai bentuk demokrasi *bottom-up*, peran kelompok masyarakat dalam proses tersebut, serta faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Pertanyaan ini relevan karena realita penganggaran di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih didominasi elite ekonomi dan politik sehingga aspirasi warga seringkali tidak terwujud dalam kebijakan yang nyata. Temuan utama menunjukkan bahwa mekanisme *participatory budgeting* Porto Alegre bekerja

melalui siklus deliberasi tahunan yang memberikan kewenangan kepada warga untuk menetapkan alokasi anggaran. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi bahwa kelompok masyarakat adalah aktor penggerak yang menentukan apakah penganggaran partisipatif berfungsi sebagai instrumen transformasi demokratis atau hanya prosedur simbolik. Analisis ini juga mengungkapkan keberhasilan PB di Porto Alegre ditopang dua faktor yang bekerja secara bersamaan, yakni komitmen politik (*political will*) pemerintah untuk berbagi kekuasaan dengan masyarakat dan kapasitas organisasi kelompok masyarakat yang sudah terbangun. Sebaliknya, kemunduran PB Porto Alegre pasca 2004 menunjukkan bahwa apabila ada faktor yang melemah, sistem partisipatif rentan terhadap de-demokratisasi.

Temuan ini berkontribusi memperkuat argumen bahwa demokrasi lokal yang substantif perlu desain institusional dan peran masyarakat sipil yang aktif dan terorganisir. Secara praktis, pengalaman Porto Alegre memberikan pelajaran khususnya dalam upaya memperkuat Musrenbang sebagai instrumen partisipasi warga di Indonesia. Penelitian ini mengakui keterbatasan berupa temuan tidak dapat digeneralisasikan langsung tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi politik, kapasitas kelembagaan, dan tradisi organisasi masyarakat sipil yang bervariasi antar negara. Penelitian selanjutnya disarankan mengkomparasi mekanisme PB Porto Alegre dan Musrenbang di Indonesia secara lebih mendalam, khususnya menggunakan data lapangan primer. Kesimpulannya, *participatory budgeting* Porto Alegre membuktikan demokrasi lokal yang substantif tidak diberikan dari atas, melainkan diperjuangkan dan dipertahankan dari bawah oleh kelompok masyarakat yang sadar akan hak politiknya. Ketika ruang partisipasi menyempit akibat pergantian rezim atau komitmen politik, yang tersisa adalah kapasitas masyarakat sipil itu sendiri untuk beradaptasi dan memperjuangkan suaranya. Hal ini relevan untuk menguatkan demokrasi lokal di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2023). Participatory Budgeting in Indonesia: From the Policy Innovation to the Democracy Innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Almasi, M., & Mohammadi, J. A. E. (2024). The Impact of Participatory Budgeting on Public Trust and Government Efficiency. *International Journal of Applied Research in Management, Economics and Accounting*, 1(2), 100–112.
- Amin, F. (2020). Pendekatan Bottom Up Budgeting dalam Penganggaran Pemerintah Daerah (Studi tentang Penganggaran Partisipatif di Komunitas Nelayan Miskin di Kawasan Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 157.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Baiocchi, G. (2001). Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment and Deliberative Democratic Theory. *Politics & Society*, 29(1), 43–72. <https://doi.org/10.1177/0032329201029001003>

- Badri, Z. H. (2019). Alternatif Bagi Penguatan Demokrasi: Pengalaman Mekanisme Anggaran Partisipatif (Participatory Budgeting) di Kota Porto Alegre, Brazil. *Review of International Relations*, 1(2).
- Bouras, W. (2024). The Role of Porto Alegre Participatory Budget Model in Local Development. *ASJP (Algerian Scientific Journal Platform)*, 6(2), 255–266.
- Carmo, G. do., Pereira, J. R., Rezende, V. A., & Felizardo, L. F. (2024). Participatory Budgeting and the Formation of Public Spheres. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(10), 1–22. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n10-023>
- Fedozzi, L., & Müller, I. D. (2025). Local Governments and Social Participation: Pathways and Setbacks of the Porto Alegre Participatory Budget. In *From the City as a Project to the City Project: Volume II: The 21st Century* (pp. 589–618). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94235-8_25
- Goldsmith, W. W., & Vainer, C. B. (2001). Participatory Budgeting and Power Politics in Porto Alegre. *Land Lines*, 13(1), 7–9.
- Handayani, D., & Imam, M. (2022). Participatory Budgeting di Era Otonomi Daerah: Studi Optimalisasi Peran Rembuk Desa sebagai Katalis Pembangunan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6(1), 118–124.
- Lefebvre, J. (2025). Changing Urban Movements Repertoires Following the Erosion of Porto Alegre's Participatory Budgeting: From Institutionalized Participation to Deinstitutionalization. *Latin American Politics and Society*, 67(2), 1–19. <https://doi.org/10.1017/lap.2024.31>
- Marquetti, A., Schonerwald da Silva, C. E., & Campbell, A. (2012). Participatory Economic Democracy in Action: Participatory Budgeting in Porto Alegre, 1989–2004. *Review of Radical Political Economics*, 44(1), 62–81. <https://doi.org/10.1177/0486613411418055>
- Naben, K. R. M. (2023). Membandingkan Demokrasi dan Penganggaran Partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbang Partisipatif ala Indonesia. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 523–529. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2889>
- Nisa, N. K., & Budiono, P. (2025). Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 9(4), 2287–2296.
- Novy, A., & Leubolt, B. (2005). Participatory Budgeting in Porto Alegre: Social Innovation and the Dialectical Relationship of State and Civil Society. *Urban Studies*, 42(11), 2023–2036. <https://doi.org/10.1080/00420980500279828>
- Rahayu, C. M., Priyanti, R. W., Anugra, A. W., Arista, R. M., & Sanjaya, N. (2025). Analisis Proses Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, 5(2), 19–26.
- Santoso, E. B., Gaol, L. L., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>

- Schugurensky, D., & Mook, L. (2024). Participatory Budgeting and Local Development: Impacts, Challenges, and Prospects. *Local Development & Society*, 5(3), 433–445. <https://doi.org/10.1080/26883597.2024.2391664>
- Silvia, R., & Lutfi, A. (2022). Participatory Budgeting: Lessons for Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 113–122. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.902>
- Touchton, M., McNulty, S., & Wampler, B. (2023). Participatory Budgeting and Community Development: A Global Perspective. *American Behavioral Scientist*, 67(4), 520–536. <https://doi.org/10.1177/00027642221086957>
- Touchton, M., McNulty, S., & Wampler, B. (2024). Participatory Budgeting and Well-Being: Governance and Sustainability in Comparative Perspective. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 36(1), 105–123.

1. Book

- Abers, R., King, R., Votto, D., & Brandão, I. (2018). *Porto Alegre: Participatory Budgeting and the Challenge of Sustaining Transformative Change*.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.
- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., ... & Safii, M. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Gita Lentera.
- Wampler, B., & Touchton, M. (2022). *Governance in Translation: Participatory Budgeting Across the Developing World*. In *The State of Accountability in the Global South* (pp. 59–75). Edward Elgar Publishing.